

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kampung Wisata Sosromenduran Yogyakarta.

Yogyakarta merupakan salah satu kota yang mengalami pertumbuhan pesat dari segi kepadatan penduduknya, faktor tersebut yang mempengaruhi cepatnya pertumbuhan penduduk, tiada lain adalah tingkat kenyamanan kota Yogyakarta untuk di huni, faktor itulah yang menjadikan Yogyakarta menjadi tempat idaman bagi masyarakat luar daerah untuk datang dan menetap di Yogyakarta. Disamping itu Yogyakarta dikenal sebagai kota yang heterogen karena banyaknya masyarakat serta kelompok yang berada dalam satu daerah, kondisi inilah yang menjadikan salah satu faktor penting bagi lonjakan perkembangan dan pertumbuhan kota Yogyakarta. Seiring terjadinya lonjakan penduduk maka di iringi pula dengan ketersediaan infrastruktur yang menunjang bagi pembangunan Kota Yogyakarta yang dapat dibuktikan dengan laju perkembangannya yang sangat pesat dari tahun ke tahun.

Salah satu kawasan yang sangat terkenal di Kota Yogyakarta adalah Malioboro yang sudah sejak lama kawasan ini merupakan daya tarik kuat bagi kedatangan wisatawan domestik maupun wisatawan

mancanegara untuk berkunjung ke Yogyakarta.⁴³ Begitu banyak orang yang melewati kawasan tersebut Malioboro adalah kawasan perekonomian terpadu di sepanjang jalan Malioboro, seperti yang diketahui di wilayah tersebut terdapat deretan pertokoan dengan PKL yang menjajakan cenderamata khas Yogyakarta, di sepanjang koridornya, kemudian di wilayah tersebut juga terdapat area perbelanjaan Mall Malioboro, Ramai Mall, Pasar Beringharjo, ditambah lagi dengan adanya Hotel berbintang seperti Hotel Ina Garuda, Hotel Santika serta beberapa Motel, Homestay, Hotel Melati, dan juga area parkir Abu Bakar Ali, dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Malioboro merupakan salah satu pusat kegiatan perekonomian Kota Yogyakarta. serta terdapat bangunan yang memiliki nilai sejarah dan budaya seperti Benteng Vredeburg dan Istana Negara Gedung Agung.

Kampung Sosromenduran adalah salah satu dari 17 kampung wisata yang telah dideklarasikan oleh pemerintah Sosromenduran terletak di kecamatan Gedongtengen. Berikut ini adalah daftar 17 kampung wisata yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta:

Tabel 2 :

17 Kampung Wisata di Yogyakarta

1. Dipowinatan	Sosial budaya dan kesenian
----------------	----------------------------

⁴³ Dinas Pariwisata Provinsi D.I Yogyakarta

2. Kadipaten	<i>Heritage</i> dan asesoris khas Yogya
3. Taman	Sejarah dan batik lukis
4. Sosromeduran	Akomodasi dan budaya
5. Tahunan	Batik jumput
6. Warungboto	Sosial budaya dan lingkungan
7. Pandeyan	Budaya
8. Purbayan	Budaya dan kuliner malam
9. Rejowinangun	Budaya
10. Prenggan	Budaya dan kuliner malam
11. Dewobronto	Penataan lingkungan dan <i>ecotourism</i>
12. Sekarniti	Budaya
13. Cokrodiningratan	<i>Heritage</i> dan penataan lingkungan
14. Becak Maju	Penataan lingkungan
15. Kauman	Sejarah dan <i>heritage</i>
16. Pakualaman	Budaya
17. Sayidan	Penataan lingkungan

Sumber: Kedaulatan Rakyat, 31 Agustus 2016 (Halaman 2)

Kampung Sosromenduran berbatasan dengan:

Utara : Kelurahan Bumijo (Jalan Suryonegaran) dan Kelurahan Gowongan (Jalan Gowongan Kidul)

Timur : Kelurahan Gowongan (Jalan P. Mangkubumi) dan Kelurahan Suryatmajan (Jalan Malioboro)

Selatan: Kelurahan Ngupasan (Jalan Pajeksan) dan Kelurahan Ngampilan

Barat : Kelurahan Pringgokusuman (Jalan Gandekan) dan Kelurahan Bumijo (Jalan Bumijo)

Wilayah Sosromenduran memiliki luas 0,4km² yang terdiri dari 14 RW dan 56 RT Jumlah penduduk Kampung Sosromenduran Rata-rata sebanyak 8.911 jiwa yang terdiri dari 4.251 laki-laki dan 4.660 perempuan keberadaannya mulai dikenal pada tahun 1970-an setelah perkembangan Malioboro sebagai wisata belanja.

Secara fisik wilayah Kampung Sosromenduran terkenal sebagai kampung internasional karena sebagian besar di huni oleh wisatawan asing dibandingkan wisatawan domestik. Tempat ini di minati banyak wisatawan lokal maupun domestik karena akses nya yang dekat dengan pusat aktivitas keramaian Malioboro disamping itu banyak terdapat tempat akomodasi seperti Hotel, Homestay, Wisma, Losmen.

Badan Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terus berusaha mengembangkan sektor pariwisata di daerah Yogyakarta, ini semua mulai di berlakukan setelah pada tahun 2008 secara intensif melakukan promosi "Visit Indonesian Year 2008" menyangkut potensi wisata yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan maksud untuk meningkatkan kunjungan wisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2008, maka dari itu Badan Pariwisata Provinsi Daerah Yogyakarta telah mempersiapkan dan menjalankan konsep pariwisata yang berbasis masyarakat.

Upaya pertama yang akan dilaksanakan adalah pengembangan wisata dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara penuh, Prinsipnya agar bagaimana membuat masyarakat juga merasakan efek positif dari keberadaan tempat wisata di daerahnya. Konsep itu berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melalui Badan Pariwisata bersama dengan beberapa pengelola obyek wisata, berikut ini adalah beberapa bentuk kerja samanya dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada warga sekitar tempat wisata atau melibatkan mereka dalam upaya pengembangan lokasi destinasi wisata itu. Target pengembangan pariwisata berbasis masyarakat adalah dengan memberdayakan masyarakat dalam mencari potensi perekonomian masyarakat yang lebih baik dengan mempergunakan potensi budaya dan potensi fasilitas penunjang wisata yang telah tersedia.

Prinsip dasar kepariwisataan berbasis masyarakat adalah dengan menempatkan masyarakat menjadi pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam semua kegiatan kepariwisataan sehingga hasil dari sektor kepariwisataan sebesar-besarnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Prinsip ini sesuai dengan Pasal 5 huruf c dan e Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyatakan kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proposionalitas dan memberdayakan masyarakat. Target utama pengembangan kepariwisataan berbasis masyarakat adalah untuk menaikan kesejahteraan masyarakat setempat, Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini Badan Pariwisata yang berperan sebagai fasilitator pengembangan kepariwisataan.

Dengan adanya prinsip kepariwisataan berbasis masyarakat maka Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mensosialisasikan konsepsi kepariwisataan untuk masyarakat setempat dengan menghadirkan para ahli dalam bidang pariwisata. Tujuan utama diadakanya sosialisasi itu adalah untuk memberikan pemahaman yang sesuai tentang pengembangan kepariwisataan berbasis budaya dan berbasis masyarakat dengan itu diharapkan agar tidak terjadi kesalahpahaman pengertian obyek wisata. Setelah itu dilakukan barulah menyamakan persepsi masyarakat tentang tujuan pembangunan.

Tujuan pembangunan yang di cita-citakan masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilaksanakan dengan cara menggunakan pengembangan kepariwisataan berbasis budaya dan berbasis masyarakat. Setelah diperoleh kesepakatan masyarakat dan dipahami barulah dirancang bersama masyarakat mengenai jenis-jenis kegiatan kepariwisataan yang akan dilaksanakan dengan tetap melibatkan masyarakat sebagai subyeknya serta kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk masyarakat setempat dengan demikian proses perencanaan dilakukan dari bawah ke atas.

Peran ahli yang berkompeten di bidang pariwisata sangat diperlukan untuk mampu menggali nilai-nilai luhur serta kearifan lokal yang menjadi adat di wilayah masyarakat sekitar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya yang berada di daerah wisata yang dapat dilibatkan dalam memperkokoh jati diri bangsa agar mereka mampu menerapkan konsep kehodipan yang berkesinambungan dengan tujuan pola hidup yang tidak rakus dalam mengeksploitasi alam.

Hal itu dilaksanakan agar sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata antara lain menyebutkan bahwa pembangunan objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan mengutamakan nilai-nilai agama, adat istiadat serta pandangan dan nilai-nilai yang luhur dijunjung masyarakat, serta hasil-hasil karya

berupa angunan atau benda yang indah dan menarik perhatian wisatawan dapat menjadi obyek dan daya tarik wisata.

Sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisatan sebagai ganti Undang-undang Kepariwisataan yang lama menyatakan bahwa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pariwisata adalah:

- a. Menjunjung tinggi nama agama dan nilai budaya sebagai pertanggung jawaban dari konsep jidup dalam berkesinambungan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dan lingkungan.
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budayam dan kearifan lokal.
- c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proposionalitas.
- d. Memelihara kelestarian hidup dan lingkungan hidup.
- e. Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sitemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan.
- f. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia.
- g. Kesepakatan internasional dalam bidang kepariwisataan.
- h. Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Repunlik Indonesia.

Pelestarian budaya adalah pemeliharaan dan pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan jadi dalam hal ini maksud kepariwisataan adalah alat untuk mempertahankan kebudayaan bukan untuk merusaknya. Bagaimana caranya agar kebudayaan dari suatu masyarakat tertentu akan dikelola, dimanfaatkan dan dikembangkan adalah menjadi wewenang masyarakat yang mendukung budaya itulah yang menentukan karena masyarakatlah yang mengetahui apa yang terbaik bagi dirinya dan lingkungan mereka.

Dilihat dari sisi pengunjung kepariwisataan budaya adalah kebutuhan wisatawan agar mendapatkan pengalaman budaya yang beda dari yang lain mengetahui dan mengalami kehidupan yang berbeda bahkan untuk mendapatkan nilai kehidupan baru yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

Upaya kedua yang dilaksanakan dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dilandaskan pada pemberdayaan budaya lokal agar dapat menunjang pembangunan pariwisata dan melaksanakan pembinaan, pemeliharaan budaya lokal dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berupaya semaksimal mungkin dalam bidangnya. Selain pemberdayaan budaya lokal potensi alam juga termasuk yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daya tarik pengembangan pariwisata.

Pengembangan pariwisata dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan tahap awal melakukan sosialisasi atau penyuluhan

pengembangan pariwisata di daerah Kampung Wisata Sosromenduran. Hasil penelitian dari responden mengenai ada atau tidaknya sosialisasi dari pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diketahui dari tabel dibawah ini:

Tabel 3 :

Sosialisasi atau Penyuluhan Pengembangan Pariwisata

Lokasi	Pernah	Tidak Pernah	Jumlah
Kampung Wisata Sosromenduran	8	12	20

Sumber : Responden Kawasan Kampung Wisata Sosromenduran 2018

Dari 20 responden yang telah di wawancara, 8 orang menjawab bahwa pernah dilakukan sosialisasi. Adanya perbedaan jawaban yang signifikan itu dikarenakan sebagian besar responden sibuk dengan pekerjaan utamanya sehingga tidak sempat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang diadakan oleh Dinas Pariwisata, bentuk-bentuk sosialisasi telah dilakukan dengan penyuluhan mengenai pengembangan pariwisata dan budaya yang mengundang dan melibatkan masyarakat dalam semua kegiatan pariwisata, bekerja sama dalam bentuk mitra kerja, penyuluhan dalam menjaga tempat wisata serta mengadakan perkumpulan atau pertemuan di lokasi wisata dengan masyarakat lokal.

Sosialisasi oleh pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah dilakukan dengan mendukung dan terlibat dalam

penyelenggaraan Festival Kesenian Yogyakarta, serta pertunjukan wisata di wilayah Kampung Sosromenduran seperti pertunjukan barongsai, aneka tarian anak, grup kesenian dan suguhan aneka kuliner makanan khas buatan warga Kampung Wisata Sosromenduran dan sebagainya.

Penulis juga melaksanakan penelitian terhadap responden mengenai keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata, hasil yang dapat diperoleh penulis dapat dilihat dari data di bawah ini:

Tabel 4 :

Keterlibatan Dalam Pengembangan Pariwisata.

Lokasi	Terlibat	Tidak Terlibat	Jumlah
Kampung Wisata Sosromenduran	12	8	20

Sumber : Responden Kawasan Kampung Wisata Sosromenduran 2018

Berdasarkan tabel diatas bisa diketahui bahwa ada sebagian responden di wilayah Kampung Wisata Sosromenduran terlibat dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangan pariwisata berbasis masyarakat diperlihatkan dengan ikut mempromosikan tempat pariwisata kepada orang lain, ikut menjaga dan melestarikan Kampung Wisata Sosromenduran, menjadi pemandu wisata, berjualan aneka kuliner untuk wisatawan yang berkunjung, serta mengikuti segala bentuk kegiatan kepariwisataan di Kampung Wisata Sosromenduran

seperti pertunjukan barongsai, aneka tarian anak, grup kesenian dan lain-lain.

Penulis juga melaksanakan penelitian terhadap responden mengenai keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam program kepariwisataan, hasil yang dapat diperoleh penulis dapat dilihat dari data di bawah ini:

Tabel 5 :
Keterlibatan Dalam Pengambilan Keputusan Dalam Program
Kepariwisataan.

Lokasi	Terlibat	Tidak Terlibat	Jumlah
Kampung Wisata Sosromenduran	5	15	20

Sumber : Responden Kawasan Kampung Wisata Sosromenduran 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden di wilayah Kampung Wisata Sosromenduran tidak terlibat dalam pengambilan keputusan dalam program kepariwisataan dan hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang masih ragu dalam memberikan saran maupun keputusan sebab masyarakat belum mengerti secara baik mengenai program wisata itu sendiri dan saat ini hanya mengikuti program yang diberikan oleh Sekretariat Kampung Wisata Sosromenduran saja, hal ini tentu saja kurang baik mengingat dalam program CBT tersebut masyarakat harus dilibatkan dalam

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan program kepariwisataan.

Beberapa dari bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata adalah dengan menyediakan penginapan-penginapan untuk para wisatawan yang berkunjung. Keterlibatan masyarakat dalam menyediakan penginapan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 6 :

Penyediaan Sarana Penginapan Oleh Masyarakat.

Lokasi	Ada	Tidak Ada	Jumlah
Kampung Wisata Sosromenduran	0	20	20

Sumber : Responden Kawasan Kampung Wisata Sosromenduran 2018

Dari tabel diatas ini dapat diketahui bahwa 20 responden menyatakan mereka tidak terlibat dalam penyediaan tempat penginapan untuk para wisatawan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang mengakibatkan masyarakat tidak bisa dan tidak perlu untuk menyediakan penginapan, faktor pertama adalah kebanyakan rumah warga di Kampung Wisata Sosromenduran merupakan rumah yang dihuni keluarga. Oleh sebab itu ketersediaan ruang untuk penginapan di rumah mereka sangat terbatas dan dapat disimpulkan tidak memungkinkan bagi masyarakat untuk menyediakan penginapan untuk wisatawan. Faktor kedua adalah sudah banyak

tempat penginapan milik swasta seperti Hotel, Motel, Homestay di area Sosromenduran. Jadi masyarakat masih belum perlu untuk menyediakan penginapan untuk wisatawan.

Masyarakat juga harus menyediakan jasa yang berhubungan dengan pariwisata guna mendukung dan menjalankan pengembangan pariwisata. Keterlibatan masyarakat dalam penyediaan jasa layanan pariwisata ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 7 :

Penyediaan Jasa Oleh Masyarakat.

Lokasi	Ada	Tidak Ada	Jumlah
Kampung Wisata Sosromenduran	10	10	20

Sumber : Responden Kawasan Kampung Wisata Sosromenduran 2018

Dengan tabel diatas dapat diketahui bahwa 10 responden menyediakan jasa pariwisata sedangkan 10 sisanya tidak menyediakanya. Hal ini dapat diketahui bahwa masyarakat baru separuhnya yang terlibat secara langsung dalam pengembangan pariwisata. Keterlibatan masyarakat dalam penyediaan jasa yang memiliki hubungan dengan pariwisata di wilayah Kampung Wisata Sosromenduran dengan menyediakan tempat kuliner, jasa pemandu wisata, penyewaan sepeda motor, penyediaan toilet umum serta berjualan souvenir dan lain-lain.

Dengan adanya kegiatan pengembangan pariwisata berdampak secara ekonomis kepada masyarakat disekitarnya, antara lain:

1. Objek wisata menjadi jauh lebih dikenal yang berakibat pada bertambahnya jumlah pengunjung wisata dan ini juga berdampak pada peningkatan penghasilan atau pendapatan masyarakat yang berada di sekitar destinasi wisata.
2. Pengembangan pariwisata juga menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar destinasi wisata karena masyarakat bisa berdagang makanan dan minuman menjadi tour guide atau pemandu wisata dan lain-lain.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis khususnya di wilayah Kampung Wisata Sosromenduran maka *Community Based Tourism Development* atau pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (CBT) mampu menambah pendapatan masyarakat setempat sekaligus memelihara budaya, kesenian serta cara hidup masyarakat, jadi kekhawatiran budaya global akan merusak budaya masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bisa di kendalikan. Disamping itu CBT melibatkan pula masyarakat dalam tahap pembuatan keputusan dan dalam pendapatan sebagian besar secara langsung dari hadirnya para wisatawan, sehingga dengan ini CBT membuat kesempatan kerja baru, mengurangi angka kemiskinan dan membawa efek positif terhadap pelestarian lingkungan dan budaya setempat yang diharapkan pada akhirnya akan

menumbuhkan jati diri dan rasa bangga dari meningkatnya kegiatan pariwisata.

Pelaksanaan CBT bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia seperti yang diinginkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 bahwa penyelenggaraan pariwisata bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Menghapus kemiskinan.
4. Mengatasi pengangguran.
5. Melestarikan alam, lingkungan serta sumber daya.
6. Memajukan kebudayaan.
7. Mengangkat citra bangsa.
8. Memupuk rasa cinta tanah air
9. Memperkokoh jati diri dan kesatuan bangsa.
10. Mempererat persahabatan antar bangsa.

Contoh signifikan peran masyarakat terhadap pengembangan industri pariwisata di wilayah Kampung Wisata Sosromenduran seperti yang telah diuraikan di atas adalah dengan berjualan makanan di sekitar lokasi wisata, menyediakan jasa pemandu wisata, serta berjualan souvenir. Selain hal tersebut masyarakat juga diperlibatkan dalam kegiatan melestarikan, menjaga serta membersihkan lokasi Kampung Wisata Sosromenduran.

Perlu menjadi perhatian bahwa pada saat ini telah terjadi perubahan pola konsumsi wisatawan dunia atau *consumers behaviour pattern* jadi mereka tidak hanya mengutamakan bersantai dan menikmati suasana, saat ini pola konsumsi sudah mulai berubah ke jenis yang tetap santai tetapi dengan selera yang lebih meningkat dengan cara menikmati produk atau kreasi budaya dan peninggalan sejarah.

Daya tarik utama wisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menempatkan masyarakatnya sebagai elemen utama adalah sesuatu yang terus menerus dilakukan. Julukan "Indonesia Mini" untuk Kota Yogyakarta adalah gambaran awal dari keunggulan wisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Upaya yang dilakukan masyarakat Kampung Wisata Sosromenduran dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat adalah dengan mengikuti saran pemerintah agar menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, bersinergi dengan masyarakat setempat agar dapat memberikan dampak secara langsung khususnya dalam peningkatan perekonomian masyarakat serta membangun dan memfasilitasi potensi wisata.

B. Faktor-faktor yang menghambat masyarakat dalam upaya pengembangan Kampung Wisata Sosromenduran.

Perkembangan kepariwisataan memberikan dampak positif maupun dampak negatif terhadap daerah dan masyarakat dimana kegiatan pariwisata tersebut dilakukan. Secara umum pariwisata berdampak positif terhadap perekonomian yaitu meningkatnya pendapatan masyarakat yang berada di daerah tujuan wisata, menambah lapangan pekerjaan dan peningkatan fasilitas umum yang ada di daerah wisata. Tetapi pariwisata juga memiliki dampak negatif seperti terjadinya pencemaran serta kerusakan lingkungan dan adanya degradasi sosial-budaya masyarakat. Dampak negatif juga terjadi pada perekonomian masyarakat dimana terjadi kesenjangan pendapatan masyarakat yang melibatkan pelaku pariwisata dengan masyarakat yang tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dengan pariwisata secara langsung serta ketidakmampuan masyarakat lokal dalam hal persaingan ekonomi dengan para investor dari luar daerah.

Dalam hal ini penulis mencoba melakukan penelitian dengan warga Kampung Wisata Sosromenduran mengenai kendala yang menghambat dalam upaya pengembangan Kampung Wisata Sosromenduran. Mengenai tujuan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat sebagai besar responden juga banyak yang belum mengetahuinya, hal ini dapat diketahui dari tabel berikut ini:

Tabel 8 :

Tujuan Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat

Lokasi	Tahu	Tidak Tahu	Jumlah
Kampung Wisata Sosromenduran	5	15	20

Sumber : Responden Kawasan Kampung Wisata Sosromenduran 2018

Ketidaktahuan responden mengenai tujuan dari pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dikarenakan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat ini semua karena 15 responden yang telah penulis wawancara menyatakan bahwa pengembangan pariwisata dilakukan untuk membangun tempat wisata menjadi lebih baik dan terkenal, pemahaman ini kurang sesuai dengan tujuan dari pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang bertujuan untuk menempatkan masyarakat sebesar mungkin dalam proses pengembangan kegiatan pariwisata dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh mafaat sebanyak-banyaknya demi terwujudnya peningkatan taraf hidup masyarakat.

Meskipun ada sebagian responden yang mengetahui tujuan dari pengembangan pariwisata berbasis masyarakat tetapi tidak semuanya mengetahui keberadaan program pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hal ini dapat diketahui dari tabel dibawah ini:

Tabel 9 :

Keberadaan Program Pengembangan Pariwisata.

Lokasi	Tahu	Tidak Tahu	Jumlah
Kampung Wisata Sosromenduran	6	14	20

Sumber : Responden Kawasan Kampung Wisata Sosromenduran 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden tidak mengetahui bahwa pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sedang mengencarkan program pengembangan pariwisata berbasis masyarakat sehingga dapat di simpulkan bahwa sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih kurang maksimal dikalangan masyarakat yang berada di daerah Kampung Wisata Sosromenduran.

Guna menjalankan program pengembangan pariwisata berbasis masyarakat Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berusaha untuk mendukung segala kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan pariwisata. Ada atau tidaknya dukungan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 10 :

Dukungan Dari Pemerintah.

Lokasi	Ada	Tidak Ada	Jumlah
Kampung Wisata Sosromenduran	9	11	20

Sumber : Responden Kawasan Kampung Wisata Sosromenduran 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat 9 orang responden di Kampung Wisata Sosromenduran menjawab terdapat dukungan terhadap pemerintah untuk kegiatan-kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan pariwisata dalam bentuk pembinaan dan pembimbingan tetapi ada 4 responden yang menjawab tidak adanya dukungan dari pemerintah untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata di daerah Kampung Wisata Sosromenduran.

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat tidak lepas dari beberapa kendala yang menghambat masyarakat Kampung Wisata Sosromenduran dalam pengembangan pariwisata antara lain adalah:

1. Sumber Daya Masyarakat (SDM) belum berkualitas.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang berada di Kampung Wisata Sosromenduran menjadi kendala tersendiri yang rata-rata tingkat pendidikannya masih tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga beberapa masyarakat sulit untuk diberikan pengertian tentang pengembangan pariwisata.

Guna mengatasi kendala tersebut maka pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara progresif memberikan penjelasan kepada masyarakat yang berada di Kampung Wisata Sosromenduran melalui tokoh masyarakat agar diharapkan pemahaman serta pengetahuannya dapat diterapkan kepada masyarakat.

2. Sumber Daya Masyarakat (SDM) yang sudah memiliki kesibukan di bidang lain.

Banyaknya Sumber Daya Manusia yang memiliki pekerjaan lain dan disibukan dengan pekerjaan utamanya khususnya di wilayah Kampung Wisata Sosromenduran menjadi penghambat pula dalam pengembangan pariwisata. Bisa dikatakan kecil kemungkinan untuk mereka yang sudah disibukan oleh pekerjaan tetap untuk terlibat secara langsung dalam pariwisata di daerah Kampung Wisata Sosromenduran.

Guna mengatasi kendala tersebut maka Sekretariat Kampung Wisata Sosromenduran berupaya untuk mengajak warganya yang belum memiliki pekerjaan untuk berpartisipasi secara penuh dalam pengelolaan pariwisata di Kampung Wisata Sosromenduran.

3. Rendahnya pemahaman terhadap kepariwisataan berbasis masyarakat.

Rendahnya pemahaman masyarakat ini juga terjadi kepada masyarakat yang memiliki pendidikan rendah tetapi juga terjadi

pada masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi. Ini semua dikarenakan sebagian besar masyarakat masih ragu untuk terlibat secara langsung atau berinvestasi dalam bidang pariwisata. Pada dasarnya masyarakat lebih tertarik untuk berinvestasi jangka pendek karena dampaknya dapat dirasakan pada waktu yang singkat sedangkan dalam pariwisata pada umumnya berjangka panjang.

Guna mengatasi kendala tersebut pemerintah melalui Dinas Pariwisata Yogyakarta berupaya dengan memberikan pemahaman dan memberikan kemudahan perizinan dalam bidang pariwisata seperti izin mengadakan acara pertunjukan wisata dalam bentuk apapun.

4. Munculnya tempat-tempat wisata baru.

Dengan banyaknya tempat wisata yang baru menjadi tantangan tersendiri bagi warga Kampung Wisata Sosromenduran hal ini yang harus dipersiapkan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam pengembangan wisata agar terus berinovasi dan mempromosikan lebih giat lagi agar tidak tertinggal dengan tempat wisata di daerah lain.

5. Kurangnya pendanaan oleh masyarakat.

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Kampung Wisata Sosromenduran sedikit banyak mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan bagi

masyarakat Kampung Wisata Sosromenduran sendiri. Meskipun pendapatan masyarakat sedikit meningkat tetapi masih dirasa kurang untuk mengembangkan usahanya yang telah ada. Untuk melakukan pengelolaan atau pelestarian tempat wisata masyarakat masih mengandalkan pendanaan dari pemerintah sedangkan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri masih belum memiliki dana yang berlebih untuk mengembangkan pariwisata.

Guna mengatasi kurangnya pendanaan dari masyarakat ataupun dari pemerintah ini maka pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Pariwisata melakukan pendekatan kemasyarakatan yang mengajak masyarakat untuk berswadaya contohnya seperti mengajak masyarakat untuk bergotong royong memperbaiki maupun membersihkan lokasi Kampung Wisata Sosromenduran.